

PROFIL KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 2019



PROFIL

PROVINSI DKI JAKARTA

KESEHATAN

2019



PROFIL KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 2019

Nomor ISBN : 978-602-0922-23-2

Nomor Publikasi : 31520.1908

Katalog : 4201003.31

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 54 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Editor : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Gambar Kulit : Bidang IPDS BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pencetak : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Buyung Airlangga, M.Bus

Editor : 1. Suryana, S.ST, M.Si
2. Ir. Siti Alifah
3. Rini Savitridina M.A

Penulis : Mega Cahya Kristianti, SST

Pembuat Cover : Ranita Rizky Aprilia, SST

Pengolah Data : Mega Cahya Kristianti, SST

<https://jakarta.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya sehingga buku “Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019” ini dapat disusun. Buku ini merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan informasi mengenai kondisi kesehatan penduduk di DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Informasi yang ditampilkan antara lain kesehatan penduduk DKI Jakarta, Kesehatan Balita, Kesehatan Wanita Usia Subur dan Fasilitas Kesehatan.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat untuk kita semuanya.

Jakarta, 7 November 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta,



BUYUNG AIRLANGGA

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	iix
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Cakupan.....	3
1.4 Penjelasan Teknis.....	3
1.5 Batasan Konsep Operasional	4
BAB II	
KESEHATAN PENDUDUK	
2.1. Derajat Kesehatan	8
2.2 Pengobatan dan Jaminan Kesehatan.....	12
BAB III	
KESEHATAN BALITA	
3.1 Keluhan Kesehatan.....	22
3.2 Angka Kesakitan.....	23
3.3 Upaya Kesehatan.....	24
3.4 Berobat Jalan.....	24
3.5 Rawat Inap	26
3.6 Penolong Kelahiran.....	27
BAB IV	
KESEHATAN WANITA USIA SUBUR	
4.1 Status Kesehatan.....	30
4.2 Angka Kesakitan.....	32
4.3 Upaya Kesehatan.....	34
4.4 Kepemilikan Jaminan Kesehatan.....	43
4.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	46
BAB V	
SARANA DAN PETUGAS KESEHATAN	
5.1 Sarana Kesehatan.....	50
5.2 Petugas Kesehatan.....	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018	11
Tabel 2	Persentase Penduduk di DKI Jakarta yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin, 2018	14
Tabel 3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, 2018	15
Tabel 4	Persentase Penduduk yang Sakit Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018	17
Tabel 5	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Sarana Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018	19
Tabel 6	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018	20
Tabel 7	Jumlah Wanita, Wanita Usia Subur, dan Wanita Usia Subur dengan Keluhan Kesehatan Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018	31
Tabel 8	Jumlah Wanita Subur (Usia 15-49 Tahun) yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	35
Tabel 9	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasannya dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	36
Tabel 10	Jumlah Wanita Subur (Usia 15-49 Tahun) yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	38

Tabel 11	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	39
Tabel 12	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	41
Tabel 13	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Jumlah Hari Rawat Inap dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	43
Tabel 14	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	45
Tabel 15	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB dan Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018	48
Tabel 16	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, 2019	52

Daftar Gambar

		Hal
Gambar 1	Persentase Angka Kesakitan di DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2018	8
Gambar 2	Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2018	10
Gambar 3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi DKI Jakarta, 2018	13
Gambar 4	Persentase Penduduk yang Sakit Tetapi Tidak Pernah Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2018	16
Gambar 5	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Sarana Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, 2018	18
Gambar 6	Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018	22
Gambar 7	Angka Kesakitan Balita Provinsi DKI Jakarta, 2018	23
Gambar 8	Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018	24
Gambar 9	Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan, 2018	25
Gambar 10	Persentase Balita yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2018	26
Gambar 11	Persentase Balita yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2018	27

Gambar 12	Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Proses Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2018	28
Gambar 13	Angka Kesakitan Wanita Usia Subur Menurut Kabupaten/ Kota di DKI Jakarta, 2018	33
Gambar 14	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan di DKI Jakarta, 2018	35
Gambar 15	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, 2018	39
Gambar 16	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Melakukan Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, 2018	40
Gambar 17	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Melakukan Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Jumlah Hari Rawat Inap di DKI Jakarta, 2018	42
Gambar 18	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Kepemilikan Jenis Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta, 2018	44
Gambar 19	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di DKI Jakarta, 2018	48
Gambar 20	Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, 2016-2018	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Salah satu cara menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat adalah dengan gaya hidup yang bersih dan sehat. Sekarang ini perhatian pemerintah telah banyak mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke sektor pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah :

- 1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
- 2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
- 3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

- 4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
- 6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta mempertinggi kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak, tidak hanya oleh seseorang tetapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan oleh masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya yang dinilai peranan cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan profil kesehatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret tahun 2018 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan.

1.3 Cakupan

Pembahasan Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan untuk mengetahui derajat kesehatan manusia mencakup masyarakat Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 melalui indikator-indikator kesehatannya.

1.4 Penjelasan Teknis

Pembangunan kesehatan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan. Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang dihitung menggunakan data Susenas Maret 2018. Indikator-indikator yang disajikan dibatasi pada kondisi/derajat kesehatan penduduk dengan beragam variabelnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Angka kesakitan/morbiditas
2. Persentase keluhan kesehatan
3. Persentase Balita diberi Imunisasi
4. Persentase penduduk berobat sendiri
5. Persentase penduduk berobat jalan
6. Persentase penduduk rawat inap
7. Persentase penolong kelahiran terakhir
8. Rata-rata lamanya Baduta (Bawah Dua Tahun) mendapat ASI
9. Kesehatan Wanita Usia Subur
10. Kesehatan Lansia

1.5 Batasan Konsep Operasional

- **Anggota Rumah Tangga (Ruta)** : semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu Ruta (Kepala Ruta, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu Ruta atau anggota Ruta lainnya.
- **Keluhan Kesehatan** : keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya.
- **Angka kesakitan/morbiditas** : persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal, seperti dalam hal pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari.
- **Upaya Kesehatan** : setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
- **Berobat jalan** : upaya anggota Ruta yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota Ruta.

- **Jaminan Kesehatan** : Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- **Rawat Inap** : Upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap 1 (satu) malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.
- **Penolong kelahiran terakhir** : siapa yang menolong pada saat proses kelahiran anak (Balita). Hingga tahun 2014, penolong persalinan ditanyakan untuk anak usia di bawah lima tahun. Namun mulai tahun 2015, penolong persalinan ditanyakan untuk wanita usia 15-49 tahun berstatus pernah kawin yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir.
- **Imunisasi** : suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terkena dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
- **Air Susu Ibu (ASI)** : satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI

mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan.

- **Rata-rata lamanya diberi ASI** : rata-rata waktu yang didapatkan anak dalam mendapatkan air susu ibunya (ASI).
- **Unmet need pelayanan kesehatan** : keadaan masyarakat yang sakit dan ingin berobat tetapi belum terlayani oleh unit kesehatan.
- **Keluarga berencana** : tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
- **Penggunaan kontrasepsi** : menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau menggunakan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dll yang digunakan oleh responden selama referensi waktu survei, yaitu sebulan terakhir.
- **Angka Kematian Ibu (AKI)** : kematian yang terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, selama masa nifas, atau dua bulan setelah berakhirnya kehamilan dan disajikan per 100.000 kelahiran hidup.
- **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** : suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelayanan Dasar).

- **Sarana Kesehatan** : tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- **Tenaga Kesehatan** : setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

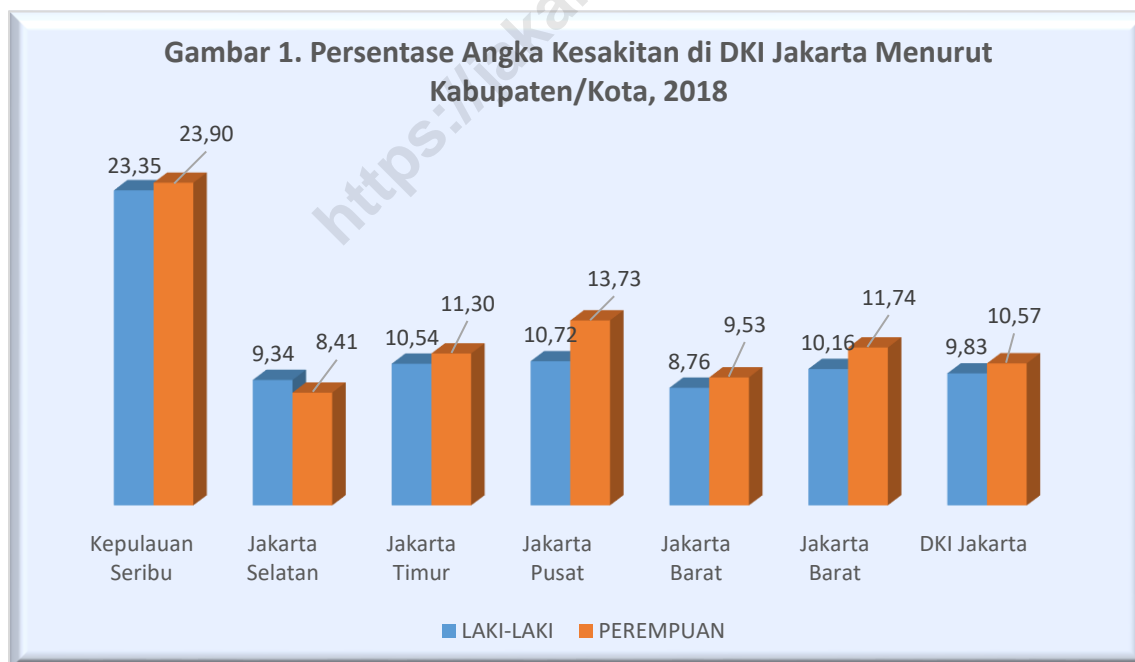
<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN PENDUDUK

2.1 Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya berkesinambungan, terpadu dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dimaksud adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat (Beaglehole, 2003).



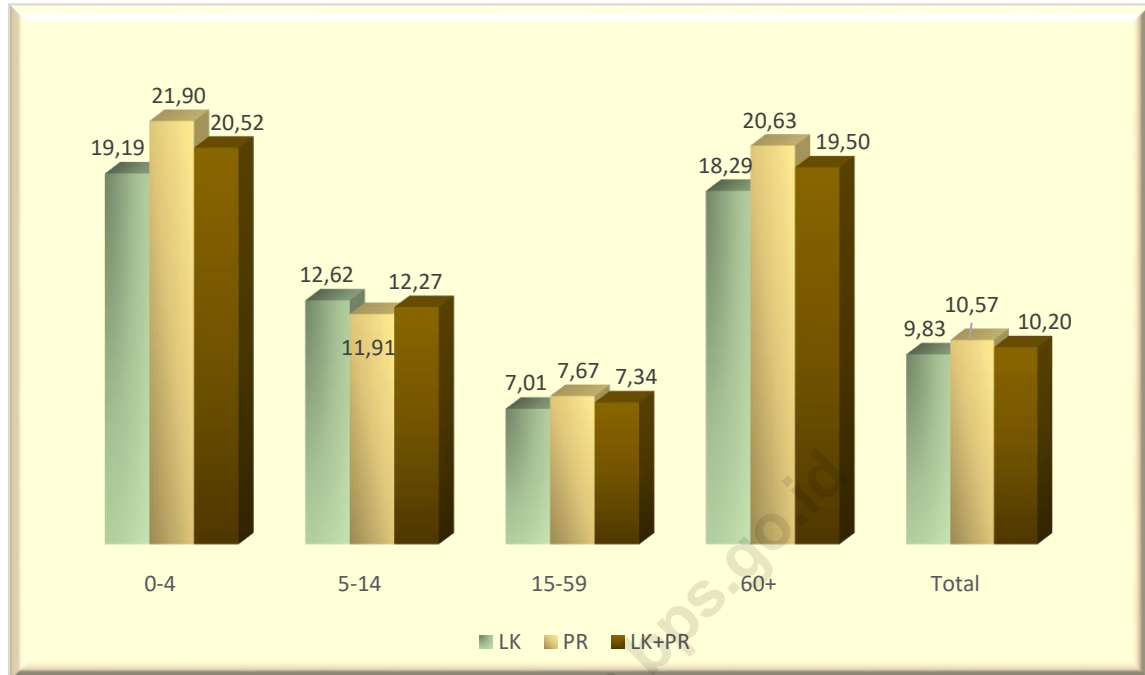
Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1.000 anak yang bisa terkena penyakit.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 seperti terlihat pada Gambar 1, penduduk DKI Jakarta yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggunya aktivitas (angka kesakitan) sebesar 10,20 persen, jika menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya sebesar 10,57 persen dan sebesar 9,83 persen untuk penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin angka kesakitan tertinggi ada di Kepulauan Seribu yakni mencapai 23,90 persen untuk perempuan dan 23,35 persen untuk laki-laki, sedangkan yang terendah di kota administrasi Jakarta Selatan yakni sebesar 8,41 persen untuk perempuan dan 9,34 persen untuk laki-laki.

Pemerintah sekarang ini telah gencar dan fokus dalam menjalankan program-program bidang kesehatan baik bersifat promotif, preventif dan kuratif di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan kesehatan yang berpihak pro rakyat demi mewujudkan Indonesia Sehat sudah semakin pesat perkembangannya. Keluhan kesehatan yang diderita oleh seseorang tidak terlepas dari pengaruh sistem kekebalan tubuh/sistem imun. Perkembangan sistem imun dimulai sejak awal dalam masa kandungan, dari keadaan lemah dan meningkat dengan seiring bertambahnya umur, pada saat umur dewasa sistem imun akan bekerja secara maksimal, dan pada akhirnya pada umur lanjut, pada umumnya akan berkurang secara bertahap.

Gambar 2. Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2018.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Pada Gambar 2. terlihat bahwa angka kesakitan penduduk DKI Jakarta secara keseluruhan paling banyak dialami oleh kelompok penduduk usia 0-4 tahun yaitu 20,52 persen dengan persentase penduduk laki-laki (0-4 tahun) mengalami angka kesakitan sebesar 19,19 persen dan penduduk perempuan (0-4 tahun) sebesar 21,90 persen, diurutkan kedua yakni kelompok usia lanjut (60+) yakni sebesar 19,50 persen dengan penduduk Lansia perempuan memiliki angka kesakitan yang jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, dan kelompok usia dengan persentase angka kesakitan terkecil yakni di kelompok usia 15-19 tahun sebesar 7,34 persen dengan persentase angka kesakitan penduduk perempuan dan penduduk laki-laki di kelompok usia tersebut tidak jauh berbeda dengan persentase masing-masing sebesar 7,67 persen dan 7,01 persen.

Tabel 1. Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018

Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur			
	0-4	5-14	15-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	24,03	21,98	20,39	56,48
Jakarta Selatan	19,72	9,05	6,15	20,08
Jakarta Timur	19,01	13,86	8,10	19,98
Jakarta Pusat	28,64	15,81	8,51	19,33
Jakarta Barat	19,70	12,53	6,52	13,96
Jakarta Utara	21,45	11,30	8,03	25,36
DKI Jakarta	20,52	12,27	7,34	19,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Sama halnya dengan angka kesakitan penduduk DKI Jakarta secara keseluruhan, angka kesakitan penduduk di masing-masing kabupaten/kota juga paling banyak di kelompok umur (0-4 tahun), dengan Kota Jakarta Pusat memiliki persentase angka kesakitan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 28,64 persen, diurutkan kedua dengan persentase angka kesakitan tertinggi yakni di kelompok umur 60+ tahun (19,50 persen) dengan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki angka tertinggi dibanding wilayah lain dengan persentase sebesar 56,48 persen, dan angka kesakitan terendah yakni dikelompok umur 15-59 tahun (7,34 persen), dengan kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya yakni sebesar 20,39 persen.

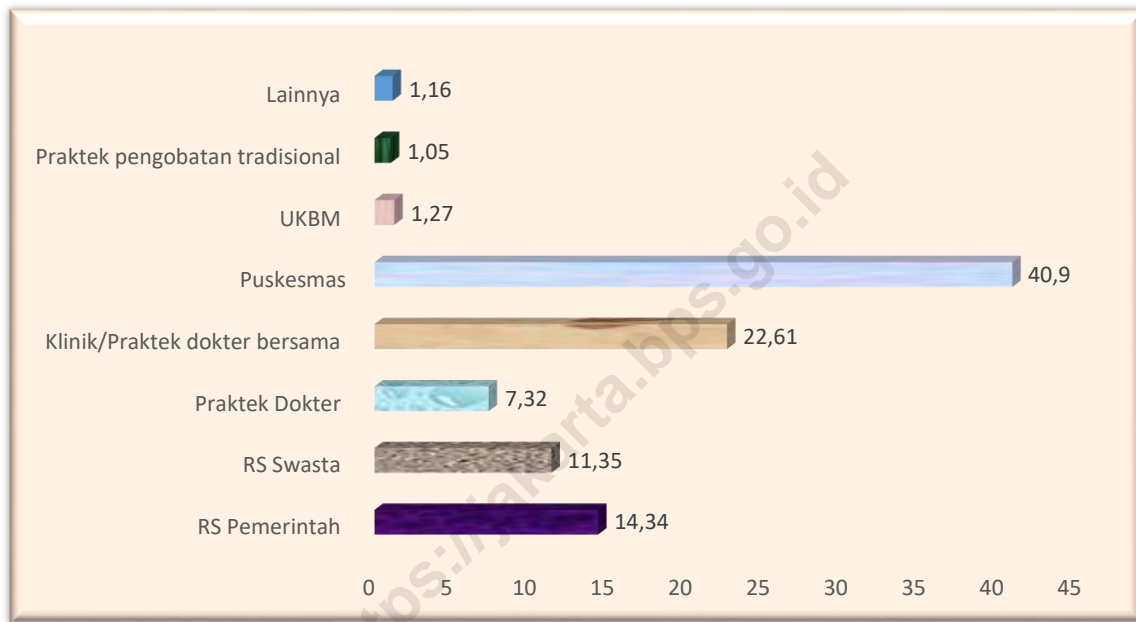
2.2 Pengobatan dan Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam hal ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mewujudkannya. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan idaman seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah, namun pada kenyataannya masih banyak negara yang belum menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan ternyata belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang mereka harapkan. Untuk membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tergolong dalam jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menjaga taraf hidup rakyat.

Berobat Jalan adalah kegiatan atau upaya masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern/tradisional dengan tanpa menginap, termasuk mendatangi petugas kesehatan ke rumahnya. Secara nasional persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan dari tahun 2015 - 2016 selalu mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 55,96 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 56,27 persen. Begitu juga dengan penduduk DKI Jakarta, penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan dari tahun 2016 - 2017 selalu mengalami peningkatan, di tahun 2016 sebesar 59,46 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 59,69 persen.

Keadaan ini menunjukkan, kesadaran penduduk untuk berobat jalan jika mempunyai keluhan kesehatan semakin meningkat. Pada Gambar berikut disajikan persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat di DKI Jakarta Tahun 2018.

Gambar 3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi DKI Jakarta, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Pada Gambar 3 terlihat secara umum penduduk Provinsi DKI Jakarta mayoritas berobat jalan melalui puskesmas sebesar 40,90 persen. Penduduk DKI Jakarta ternyata sudah banyak memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari persentase pemanfaatan Puskesmas untuk tempat berobat jalan sudah tinggi.

Hal menarik yang terjadi bahwa di tengah-tengah kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah semakin canggih ternyata masih terdapat sebagian

kecil penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengobatan ke tempat pengobatan tradisional walau hanya sebesar 1,05 persen.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa antara laki-laki dan perempuan, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan mempunyai persentase yang hampir sama di masing-masing jenis sarana kesehatan, namun untuk sarana kesehatan Puskesmas ternyata yang paling banyak memanfaatkan yakni perempuan dibandingkan laki-laki dengan persentase sebesar 45,32 persen untuk perempuan, dan 39,98 persen untuk laki-laki.

Tabel 2. Persentase Penduduk di DKI Jakarta yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin, 2018

Tempat Berobat	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
RS. Pemerintah	16,32	14,53	15,34
RS. Swasta	12,74	12,10	12,39
Praktik Dokter/Bidan	6,95	7,63	7,32
Klinik/Praktik dokter bersama	26,11	23,36	24,61
Puskesmas/Pustu	39,98	45,32	42,90
UKBM*	1,46	2,20	1,87
Praktik Pengobatan Tradisional/alternatif	1,27	0,87	1,05

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

*UKBM : Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Jaminan kesehatan penting untuk dimiliki karena dapat menjamin penduduk memperoleh pelayanan kesehatan saat penduduk tersebut merasa kesehatannya terganggu. Sesuai dengan program pemerintah yang dituangkan dalam visi BPJS bahwa, paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa sebanyak 35,31 persen penduduk DKI Jakarta menggunakan jaminan kesehatan BPJS PBI untuk berobat jalan, dan yang paling banyak yakni di Kab. Kepulauan Seribu sebesar 67,20 persen.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, 2018

Jenis Jaminan Kesehatan	Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	DKI Jakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BPJS PBI	67,20	27,00	32,35	47,30	34,01	41,31	35,31
BPJS Non PBI	26,48	10,02	19,31	18,27	12,09	12,59	14,65
Jamkesda	n.a	0,14	0,36	1,65	0,16	0,42	0,43
Asuransi Swasta	n.a	0,38	2,18	1,66	0,73	1,42	1,31
Perusahaan	n.a	4,51	4,84	5,35	0,93	5,76	3,98
Tidak Menggunakan	6,32	57,95	40,96	25,77	52,08	38,5	44,32
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

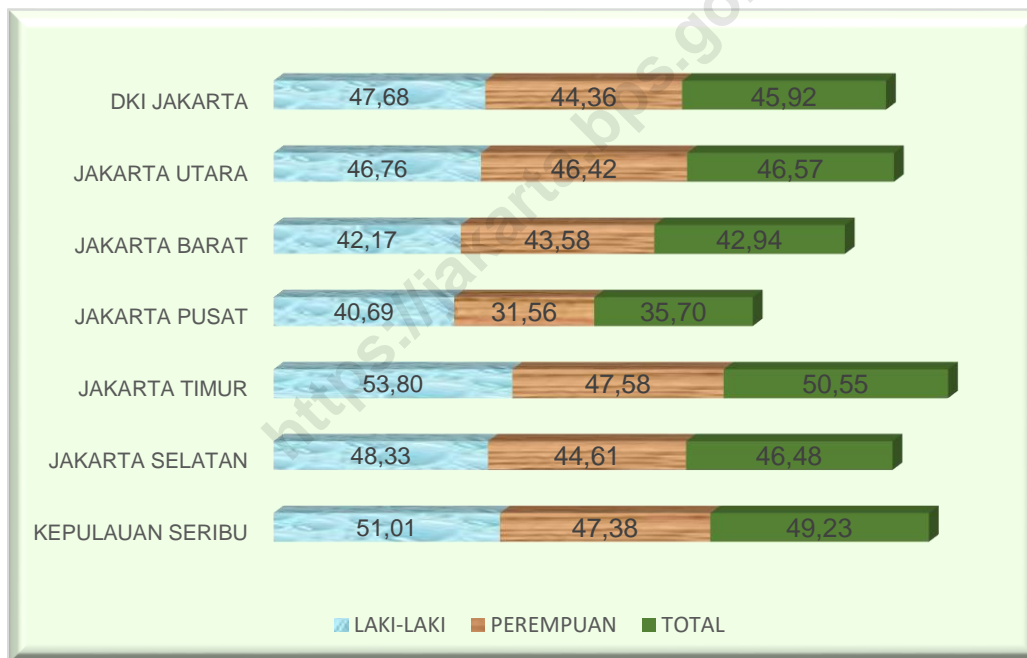
Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Ada banyak jenis jaminan kesehatan yang beredar di masyarakat seperti BPJS kesehatan (PBI atau Non PBI), Askes/Asabri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda, asuransi swasta ataupun perusahaan/kantor. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa penggunaan jaminan kesehatan saat berobat jalan di DKI Jakarta cenderung cukup tinggi yakni sebesar 55,68 persen, jika dilihat dari jenis jaminannya persentase terbesar penggunaan jaminan kesehatan saat berobat jalan yakni dengan menggunakan BPJS

PBI sebesar 35,31 persen, penggunaan jaminan terbesar kedua yakni BPJS Non PBI sebesar 14,65 persen.

Tidak seluruh penduduk di DKI Jakarta yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu melakukan rawat jalan (berobat jalan). Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 45,92 persen penduduk mengalami sakit tetapi tidak pernah berobat jalan, dengan persentase laki-laki sebesar 47,68 persen dan perempuan sebesar 44,36 persen.

Gambar 4. Persentase Penduduk yang Sakit Tetapi Tidak Pernah Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Persentase penduduk sakit tetapi tidak pernah berobat jalan untuk setiap kabupaten/kota cukup berkisar antara 36 persen sampai dengan 51 persen. Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat dan tertinggi di Kota Jakarta Timur. Apabila dilihat menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota, persentase penduduk yang sakit tetapi tidak

berobat jalan pada umumnya lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, kecuali di Kota Jakarta Barat (Gambar 4).

Tetapi perlu diingat, besarnya persentase penduduk sakit tetapi tidak pernah berobat jalan untuk setiap kabupaten/kota belum tentu disebabkan oleh *unmet need* dari pelayanan kesehatan, bisa jadi karena merasa tidak perlu diobati atau alasan medis. *Unmet need* alasan kesehatan dapat berupa tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transpor, tidak ada sarana transportasi dan waktu tunggu pelayanan yang lama.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Sakit Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	Tidak punya biaya berobat	Tidak ada biaya transpor	Tidak ada sarana transportasi	Waktu tunggu pelayanan lama	Mengobati sendiri	Tidak ada yang mendampingi	Merasa tidak perlu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kep. Seribu	n.a	n.a	n.a	n.a	35,12	n.a	64,88	n.a
Jakarta Selatan	1,29	0,35	2,18	0,23	53,36	0,09	36,29	6,21
Jakarta Timur	0,42	0,06	n.a	1,28	69,58	0,12	27,37	1,16
Jakarta Pusat	0,37	0,38	n.a	2,2	53,1	0,36	41,48	2,12
Jakarta Barat	0,31	0	n.a	1,91	59,43	0,15	37,74	0,46
Jakarta Utara	n.a	0,3	n.a	0,65	65,77	0,52	30,37	2,39
DKI Jakarta	0,46	0,16	0,37	1,2	62,51	0,21	32,95	2,14

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

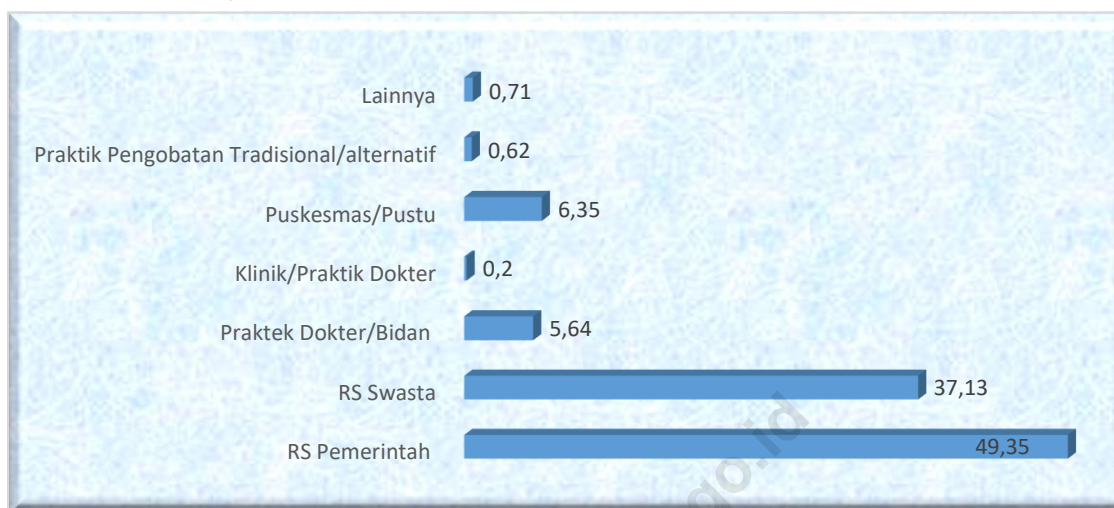
Pada Tabel 4 terlihat *unmet need* dengan alasan ekonomi (tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi dan tidak ada sarana transportasi) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hanya sebesar 0,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa biaya berobat bukanlah menjadi penghalang lagi penduduk DKI Jakarta tidak berobat ke sarana kesehatan mengingat rumah sakit negeri di DKI Jakarta sudah banyak menggratiskan biaya berobatnya melalui program-program yang sudah digulirkan pemerintah untuk masyarakat miskin diantaranya BPJS PBI dan KJS.

Demikian juga alasan tidak adanya sarana transportasi juga bukan menjadi faktor penghalang, hampir sebagian besar jalanan di daerah DKI Jakarta bisa dilalui oleh transportasi umum, dengan begitu jarak antara tempat tinggal dan sarana kesehatan bisa dengan mudah dicapai.

Dari Tabel 4 di atas juga terlihat bahwa alasan tidak berobat jalan terbesar yakni mengobati sendiri yakni sebesar 62,51 persen. Mengobati sendiri ini bisa dengan membeli obat di warung tanpa resep dokter, meminum jamu, urut, dll. Alasan tidak berobat jalan terbesar kedua yakni sebanyak 32,95 persen penduduk DKI Jakarta merasa tidak perlu berobat, mereka menganggap bahwa penyakit yang mereka derita bisa sembuh dengan sendirinya tanpa dibawa ke fasilitas kesehatan.

Alternatif lain atas tindakan pengobatan terhadap keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang selain berobat jalan yakni dapat melakukan tindakan rawat inap di fasilitas pengobatan. Upaya pengobatan yang dilakukan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan sudah dikatakan melakukan rawat inap. Pada Gambar 5 terlihat bahwa persentase terbesar penduduk DKI Jakarta yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat inap setahun terakhir yakni dirawat di rumah sakit pemerintah sebesar 49,35 persen dan kedua yakni di rumah sakit swasta sebesar 37,13 persen.

Gambar 5. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Sarana Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Sarana Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepulauan Seribu	57,51	6,26	n.a	n.a	34,79	1,43	n.a
Jakarta Selatan	40,39	46,84	2,9	0,45	6,06	0,94	3,25
Jakarta Timur	54,53	35,46	3,16	0,23	6,04	1,61	n.a
Jakarta Pusat	45,39	45,02	2,44	n.a	8,47	n.a	n.a
Jakarta Barat	59,04	19,68	14,38	n.a	7,45	n.a	n.a
Jakarta Utara	46,52	42,67	4,53	0,61	6,55	n.a	n.a
DKI Jakarta	49,25	37,07	5,64	0,15	6,73	0,51	0,65

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat inap per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, ternyata sebagian besar penduduk di enam kab/kota di DKI Jakarta cenderung memilih

untuk di rawat inap baik di rumah sakit pemerintahan maupun di rumah sakit swasta terlihat dari persentase dua sarana kesehatan ini lebih besar dibanding dengan sarana kesehatan lainnya. Dua kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduknya di rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah yakni Jakarta Barat (59,04 %), dan Kepulauan Seribu (57,51 %). Pemanfaatan sarana kesehatan puskesmas ternyata yang paling banyak yakni di Kepulauan Seribu yakni sebesar 34,79 persen, hal ini dikarenakan belum banyaknya sarana kesehatan yang berupa praktik dokter/bidan yang didirikan di Kepulauan Seribu.

Tabel 6. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Seribu	2,84	4,18	3,51
Jakarta Selatan	3,87	5,05	4,46
Jakarta Timur	2,96	5,22	4,08
Jakarta Pusat	3,21	6,16	4,69
Jakarta Barat	2,77	4,64	3,70
Jakarta Utara	4,15	7,05	5,61
DKI Jakarta	3,33	5,44	4,38

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Jika dilihat dari Tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan di enam kabupaten/kota se-DKI Jakarta lebih banyak mendapatkan tindakan rawat inap sebesar 5,44 persen atau lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 3,33 persen. Hal ini dapat dimungkinkan oleh karena kaum perempuan cenderung banyak memerlukan layanan persalinan di sarana kesehatan karena kebutuhan kodrat perempuan untuk melahirkan sehingga meningkatkan proporsi perempuan untuk melakukan tindakan berobat rawat inap.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB III

KESEHATAN BALITA

Upaya kesehatan anak yang dilakukan terutama bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak yang diutamakan pada upaya menurunkan angka kematian Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; menjamin terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan siklus hidup.

Berbagai indikator disusun guna mengetahui kemajuan dan evaluasi berbagai program untuk peningkatan status kesehatan anak. Di tingkat nasional berbagai upaya terkait kesehatan Balita antara lain gizi, kematian dan imunisasi tercantum dalam sasaran pokok pembangunan manusia dan masyarakat bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di tingkat internasional, komitmen untuk meningkatkan status kesehatan anak dituangkan pula dalam target-target pembangunan antara lain imunisasi, gizi, dan kematian yang dihimpun dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

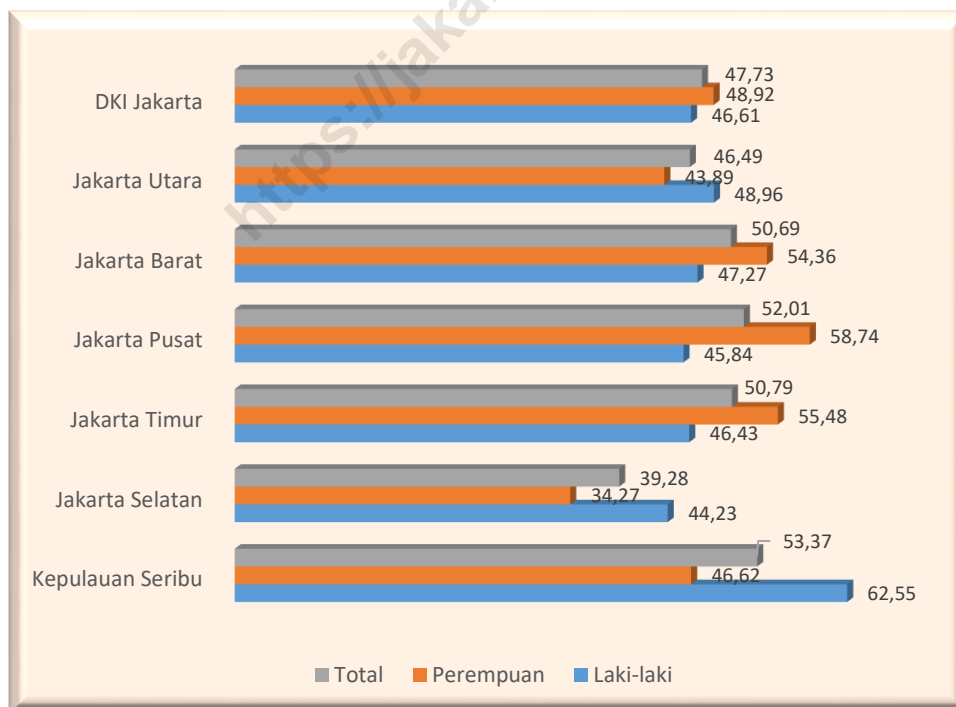
Badan Pusat Statistik memfasilitasi berbagai indikator pembangunan yang dibutuhkan pemerintah terkait RPJMN, SDGs dan Nawa Cita. Salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dapat memfasilitasi berbagai data dan informasi terkait status kesehatan anak. Pada bab ini dipaparkan berbagai data dan informasi hasil Susenas Maret 2017 terkait dengan

kesehatan balita antara lain keluhan kesehatan, angka kesakitan, upaya kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, imunisasi dan pemberian air susu ibu (ASI).

3.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Berbagai macam cara dilakukan ketika seseorang mengalami keluhan kesehatan. Ada yang mengobati sendiri, ada yang dibiarkan saja, ada yang rawat jalan atau berobat jalan serta bahkan ada yang sampai rawat inap.

Gambar 6. Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 6 menunjukkan bahwa persentase Balita yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di DKI Jakarta sebesar 47,73 persen, dengan persentase Balita laki-laki 46,61 persen dan perempuan sebesar 48,92 persen. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota persentase Balita yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir terbesar ada di Kepulauan Seribu yakni sebesar 53,37 persen, angka ini juga lebih besar dibandingkan dengan angka Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Angka Kesakitan

Angka Kesakitan yakni jumlah Balita yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatannya sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh Balita dan dinyatakan dalam persen. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis yang terjadi akibat adanya gangguan kesehatan atau kejiwaan. Sedangkan terganggunya kegiatan sehari-hari adalah kondisi di mana seorang Balita tidak dapat melakukan kegiatan (bermain, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.

Gambar 7. Angka Kesakitan Balita Provinsi DKI Jakarta, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

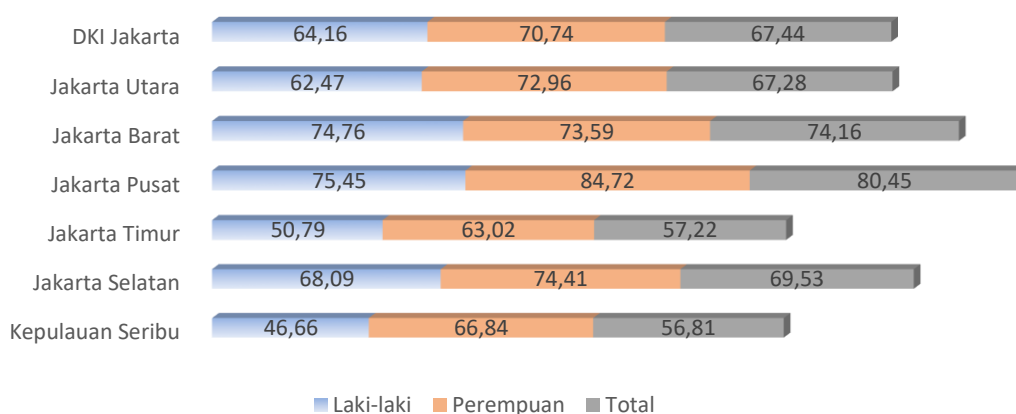
3.3 Upaya kesehatan

Berbagai upaya pengobatan seharusnya dilakukan oleh orang tua Balita saat seorang Balita mengalami keluhan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Upaya kesehatan yang seharusnya ditempuh adalah mengunjungi fasilitas maupun tenaga kesehatan seperti berobat jalan atau rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

3.4 Berobat Jalan

Pemerintah maupun pihak swasta telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat untuk mengobati keluhan kesehatan yang dialami dengan cara berobat jalan. Indikator rawat jalan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Sebagaimana disajikan pada gambar dibawah, persentase Balita yang mempunyai keluhan kesehatan dan sudah berobat jalan menunjukkan angka yang bagus yakni sudah diatas 50 persen baik laki-laki maupun perempuan begitu juga di semua kabupaten/kota di DKI Jakarta.

Gambar 8. Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018

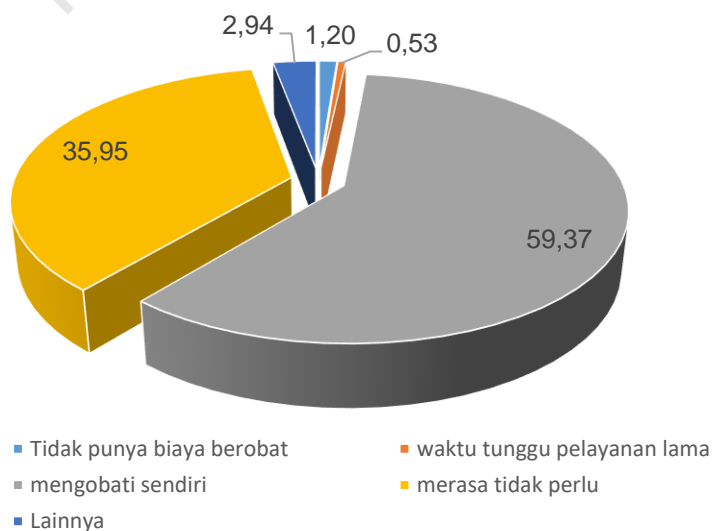


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Saat seorang Balita mempunyai keluhan kesehatan, sedianya orang tua segera mengantar untuk menemui petugas kesehatan sehingga mendapatkan tindakan medis yang tepat. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut tidak berobat jalan. Berdasarkan data Susenas Maret 2018, dari seluruh Balita yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sekitar 67,44 persen melakukan berobat jalan dan sekitar 32,56 persen tidak berobat jalan.

Susenas Maret 2018 mencatat berbagai alasan yang disampaikan orang tua Balita maupun penanggung jawab Balita yang tidak berobat jalan saat mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Alasan yang disampaikan tersebut utamanya adalah mengobati sendiri (59,37 %) dan merasa tidak perlu (35,95 %).

Gambar 9. Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan, 2018

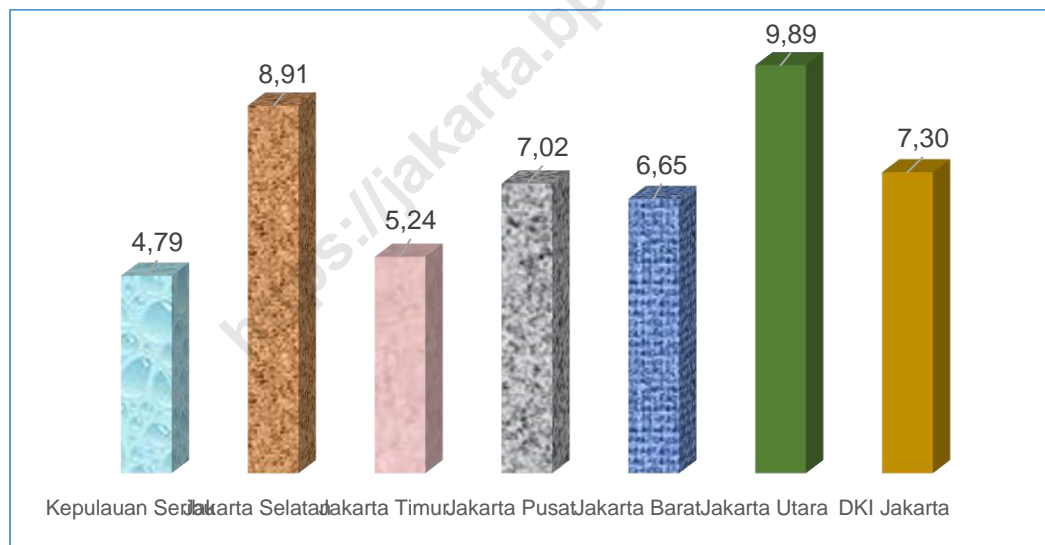


Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

3.5 Rawat Inap

Beberapa kasus keluhan kesehatan yang dialami oleh Balita memerlukan penanganan yang lebih dari sekedar berobat jalan. Tentunya tenaga kesehatan akan memberi arahan untuk rawat inap di fasilitas kesehatan. Dengan rawat inap, pelayanan kesehatan yang diperoleh Balita akan lebih menyeluruh, termasuk observasi dan diagnosis juga terapi dan tindakan yang lebih tepat serta mendapatkan berbagai jenis pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien.

Gambar 10. Persentase Balita yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2018

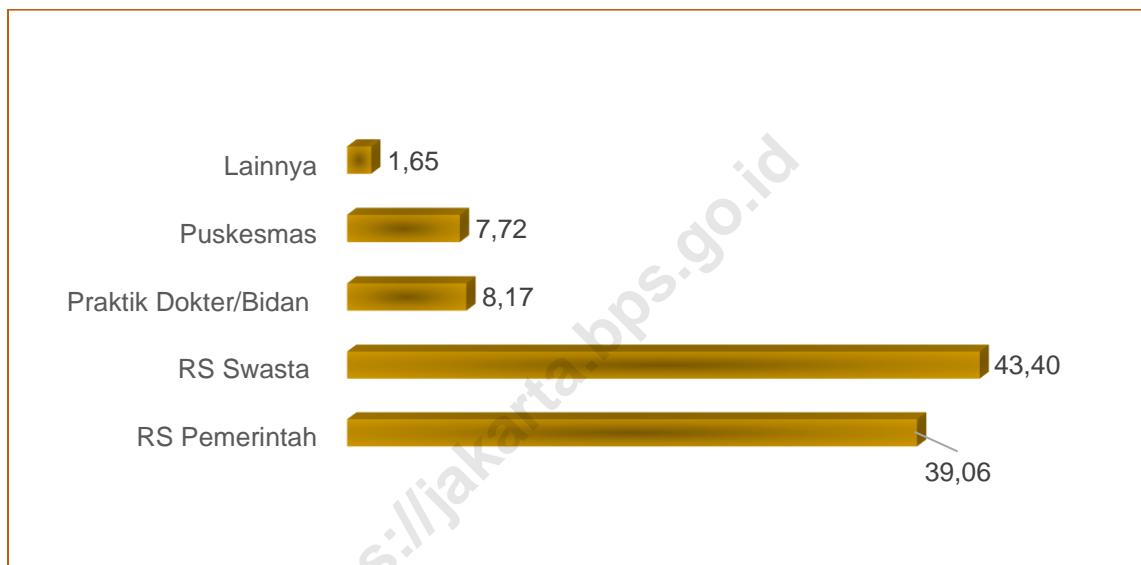


Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 10 menyajikan informasi persentase Balita yang rawat inap dalam setahun terakhir di DKI Jakarta, dengan persentase sebesar 7,30 persen. Berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa persentase tertinggi Balita yang pernah di rawat inap ada di Kota Jakarta Utara yakni sebesar 9,89 persen, dan persentase terendah Balita yang

pernah rawat inap ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan persentase sebesar 4,79 persen. Tempat rawat inap yang dipilih oleh orang tua Balita secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase balita yang pernah dirawat inap di rumah sakit swasta lebih tinggi dibanding dengan rumah sakit pemerintahan.

Gambar 11. Persentase Balita yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2018

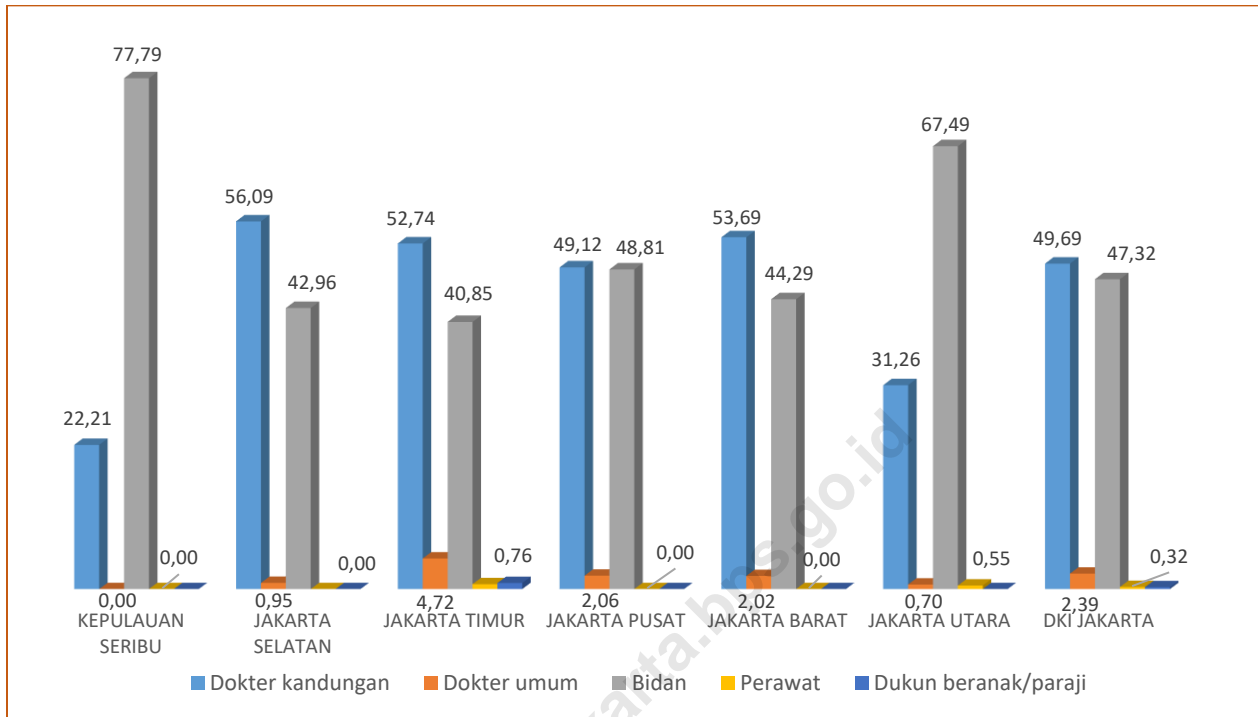


Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

3.6 Penolong Kelahiran

Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai serta menyediakan tenaga medis terampil penolong kelahiran. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi resiko kematian Ibu dan anak. Hasil Susenas 2018 terkait penolong persalina ditampilkan dalam Gambar 12.

Gambar 12. Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Proses Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan penduduk Provinsi DKI Jakarta mayoritas persalinannya dilayani oleh tenaga dokter (dokter kandungan maupun dokter umum) mencapai 49,69 persen dan disusul oleh tenaga bidan sebesar 47,32 persen. Menurut Kabupaten/Kota persalinan oleh tenaga dokter paling banyak dilakukan oleh penduduk Jakarta Selatan sebesar 56,09 persen, sedangkan persalinan oleh tenaga bidan terbanyak ada di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 77,79 persen.

BAB IV

KESEHATAN WANITA USIA SUBUR

Wanita Usia Subur (WUS) dalam konsep Susenas didefinisikan sebagai wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin maupun pernah kawin (cerai hidup dan cerai mati). Menurut Depkes RI (1993) wanita usia produktif merupakan wanita yang berusia 15-49 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan. Sedangkan menurut (BKKBN, 2001), wanita usia subur (wanita usia produktif) adalah wanita yang berumur 18-49 tahun yang berstatus belum kawin, kawin ataupun janda. Karakteristik wanita usia produktif berhubungan dengan *premenstrual syndrome* antara lain berkaitan dengan umur, pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan status perkawinan.

Pada bab ini akan diuraikan kaitan antara wanita usia subur yang berstatus kawin atau pernah kawin dengan status kesehatannya, kepemilikan jaminan kesehatan, angka kematian ibu, dan umur perkawinan pertama, serta saat kelahiran. Informasi mengenai penggunaan alat/cara KB hanya ditanyakan kepada WUS umur 15-49 yang berstatus kawin.

4.1. Status Kesehatan

Status kesehatan dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan status kesehatan secara langsung antara lain melalui pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui

pendekatan obyektif. Sedangkan pemeriksaan tidak langsung dilakukan melalui persepsi sendiri atau pendekatan subyektif. Susenas yang dilakukan oleh BPS menggunakan pendekatan subyektif, karena dilakukan dengan menanyakan kondisi kesehatan kepada responden seperti keluhan kesehatan yang dialami oleh individu dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi keluhan tersebut.

Pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.444.227 orang yang terdiri dari 5.237.633 laki-laki (50,15 %) dan 5.206.594 wanita (49,85 %). Lebih dari separuh wanita (57,70 %) merupakan wanita usia subur dengan umur 15-49 tahun.

Tabel 7. Jumlah Wanita, Wanita Usia Subur, dan Wanita Usia Subur dengan Keluhan Kesehatan Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	Jumlah Wanita	Jumlah Wanita 15-49	Wanita 15-49 dengan Keluhan Kesehatan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Seribu	12.088	6.173	2.313	37,46
Jakarta Selatan	1.119.358	642.405	99.882	15,55
Jakarta Timur	1.443.600	820.770	225.694	27,50
Jakarta Pusat	462.953	257.556	63.805	24,77
Jakarta Barat	1.263.593	744.012	168.735	22,68
Jakarta Utara	905.002	533.360	135.332	25,37
DKI Jakarta	5.206.594	3.004.276	695.761	23,16

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 7 menunjukkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dari total 3.004.276 wanita usia subur (umur 15-49 tahun) sebanyak 23,16 persen diantaranya mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud disini adalah keluhan kesehatan secara umum seperti panas, batuk, pilek, diare, pusing, atau keluhan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit kronis yang diderita. Apabila dicermati persentase wanita usia subur yang mengalami keluhan kesehatan di setiap wilayah, tampak bahwa persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan. Sepertiga (37,46 %) dari total wanita usia subur di Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami keluhan kesehatan, sedangkan di Kota Jakarta Selatan hanya 15,55 persen wanita usia subur yang mengalami keluhan kesehatan. Persentase jumlah wanita usia subur dengan keluhan kesehatan di wilayah lain berkisar antara 22-27 persen dari total wanita usia subur yang ada.

4.2. Angka Kesakitan

Angka kesakitan didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatan sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan yang dialaminya dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keluhan kesehatan fisik maupun psikis yang terjadi akibat adanya gangguan kesehatan atau kejiwaan. Sedangkan yang dimaksud terganggu kegiatan sehari-hari adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat melakukan kegiatannya baik bekerja, sekolah, atau kegiatan lainnya sebagaimana biasanya pada saat tidak mengalami keluhan kesehatan.

Gambar 13. Angka Kesakitan Wanita Usia 15-49 tahun Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Berdasarkan data Susenas Maret 2018, persentase wanita umur 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 23,16 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kesakitannya yakni sebesar 6,65 persen. Angka kesakitan wanita usia 15-49 tahun pada taraf nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kesakitan wanita usia 15-49 tahun di DKI Jakarta. Pada tahun 2016 berdasarkan data Susenas Maret 2016, angka kesakitan wanita usia 15-49 tahun di Indonesia mencapai 11,47 persen.

Apabila dilihat data antar wilayah tampak bahwa angka kesakitan wanita usia subur pada tahun 2018 paling tinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, mencapai 19,33 persen.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kesakitan wanita usia subur pada level provinsi. Selain Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara juga mempunyai angka kesakitan wanita usia subur yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 8,02 persen dan 7,90 persen. Wilayah lain dengan angka kesakitan yang lebih rendah adalah Kota Jakarta Barat (6,61 persen), Kota Jakarta Timur (7,06 persen), dan terendah di Kota Jakarta Selatan (4,48 persen).

4.3. Upaya Kesehatan

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan pada umumnya akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi keluhan kesehatan yang dirasakannya, demikian juga pada wanita usia subur. Upaya yang dilakukan ada bermacam-macam, diantaranya dengan mengobati sendiri, melakukan rawat jalan, atau bahkan rawat inap tergantung dari jenis keluhan kesehatan yang perlu ditangani. Meskipun demikian, tidak jarang ditemui orang yang tidak melakukan upaya apa-apa terkait keluhan yang dialaminya.

4.3.1. Berobat Jalan

Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengobati keluhan kesehatan yang dialami dengan cara berobat jalan di Provinsi DKI Jakarta ada yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan ada juga yang disediakan oleh swasta. Seperti yang sudah disampaikan dimuka, fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sangat banyak dan lengkap. Masyarakat dapat memilih fasilitas untuk berobat jalan sesuai dengan yang diinginkannya, baik itu Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan lain sebagainya.

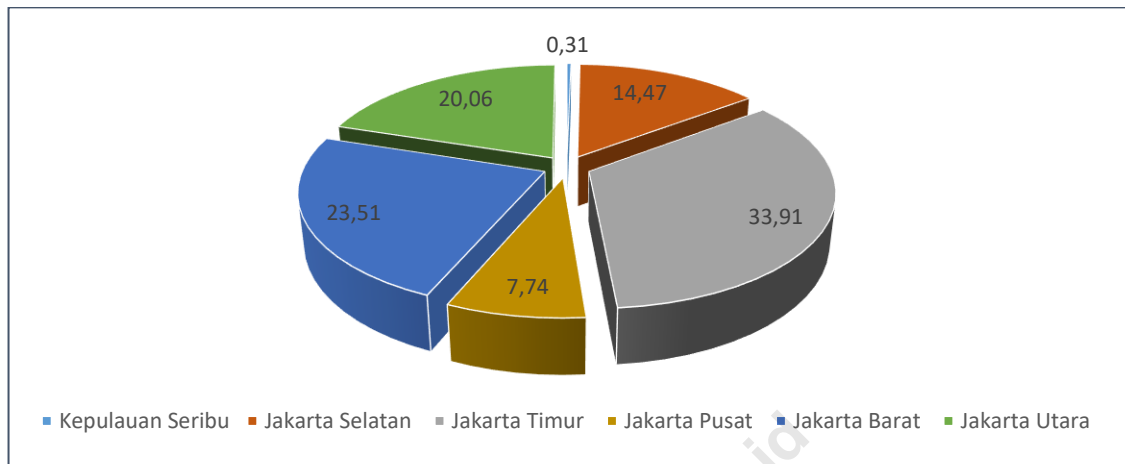
Berdasarkan data Susenas Maret 2018, kurang dari separuh (45,71 %) wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rawat jalan. Mereka tersebar di 6 wilayah di DKI Jakarta dengan jumlah mencapai 318.012 orang wanita dari total 695.761 wanita usia subur pada tahun 2018. Kondisi masing-masing wilayah bervariasi dengan persentase tertinggi di Kota Jakarta Pusat mencapai 34.554 orang wanita (54,16 %) dari total wanita usia 15-49 tahun di Kota Jakarta Pusat. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan melakukan rawat jalan terendah di Kota Jakarta Timur, sebanyak 43,24 persen (Tabel 8).

Tabel 8. Jumlah Wanita Subur (Usia 15-49 Tahun) yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	WUS Dengan Keluhan Kesehatan		
	Jumlah	Berobat Jalan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	2.313	1.149	49,66
Jakarta Selatan	99.882	45.206	45,26
Jakarta Timur	225.694	97.591	43,24
Jakarta Pusat	63.805	34.554	54,16
Jakarta Barat	168.735	79.969	47,39
Jakarta Utara	135.332	59.543	44,00
DKI Jakarta	695.761	318.012	45,71

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 14. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Mereka yang mengalami keluhan kesehatan dan tidak melakukan rawat jalan dapat dimungkinkan karena melakukan pengobatan sendiri atau alasan lain. Jumlah wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan tidak melakukan rawat jalan pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 377.749 orang wanita. Dari jumlah tersebut paling banyak berada di Kota Jakarta Timur mencapai 128.103 wanita (33,91%) dan Jakarta Barat sebanyak 88.766 wanita (23,51 %).

Tabel 9. Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasannya dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kabupaten/ Kota	Tidak punya biaya berobat	Tidak ada biaya transpor	Tidak ada sarana transportasi	Waktu tunggu pelayanan lama	Mengobati sendiri	Tidak ada yang mendampingi	Merasa tidak perlu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kep. Seribu	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	61,00	0,00	100,00
Jakarta Selatan	2,30	0,00	1,20	0,00	58,80	0,00	31,80	5,90	100,00
Jakarta Timur	0,00	0,00	0,00	1,80	70,40	0,00	26,60	1,20	100,00
Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	1,20	54,60	0,70	41,70	1,80	100,00
Jakarta Barat	0,20	0,00	0,00	1,60	60,60	0,00	36,70	0,90	100,00
Jakarta Utara	0,00	0,50	0,00	0,40	63,90	0,00	32,60	2,60	100,00
DKI Jakarta	0,40	0,10	0,20	1,20	63,90	0,10	32,00	2,20	100,00

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Mengobati sendiri menjadi alasan yang paling banyak dibandingkan dengan alasan lainnya, sehingga wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan. Jumlah yang mengobati sendiri mencapai lebih dari separuh, yaitu 63,9 persen. Mereka yang tidak berobat jalan karena merasa tidak perlu menempati urutan kedua yaitu sebanyak 32,00 persen. Alasan lain relatif kecil, misalnya waktu tunggu pelayanan yang lama sebesar 1,2 persen.

Apabila diperhatikan lebih jauh menurut kabupaten/kota tampak bahwa alasan mengobati sendiri untuk setiap wilayah berkisar antara 39 persen hingga 70 persen. Sekitar 70,4 persen wanita usia subur umur 15-49 persen di Kota Jakarta Timur tidak melakukan rawat jalan karena mengobati sendiri, alasan terbesar kedua yakni merasa tidak perlu (26,5 %). Di Kota Jakarta Timur, sebanyak 1,8 persen mempunyai alasan waktu tunggu pelayanan lama menyebabkan mereka tidak melakukan rawat jalan. Alasan waktu tunggu lama ini paling besar jumlahnya di Kota Jakarta Timur, di wilayah lain alasan serupa tidak sampai dua persen jumlahnya.

4.3.2. Rawat Inap

Pada beberapa kasus terkadang berobat jalan tidak cukup untuk mengurangi atau menghilangkan keluhan kesehatan yang dialami oleh wanita usia 15-49 tahun. Dokter atau tenaga medis lain terkadang menyarankan atau bahkan mengharuskan untuk melakukan rawat inap agar keluhan kesehatan cepat dapat ditangani. Pada tahun 2018, sebesar 5,98 persen wanita usia 15-49 tahun yang melakukan rawat inap atas keluhan yang dideritanya. Jumlah ini mencapai 179.604 wanita berdasarkan Susenas Maret 2018, yang tersebar di enam wilayah di DKI Jakarta. Apabila diperhatikan kondisi untuk setiap wilayah tampak bahwa persentase terendah wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan rawat inap terkecil di Kabupaten Kepulauan Seribu, mencapai 250 wanita (4,05 %).

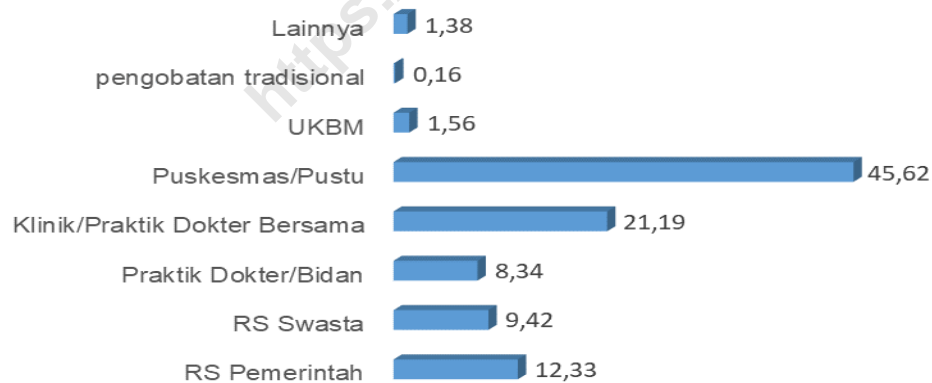
Berdasarkan data Susenas Maret 2018, wanita usia 15-49 tahun dalam setahun terakhir yang melakukan rawat jalan lebih memilih fasilitas berupa Puskesmas (45,61%) dan Klinik/Praktik Dokter Bersama (21,19%) dibandingkan fasilitas yang lain. Secara keseluruhan kedua fasilitas ini digunakan oleh hampir dua per tiga (66,8%) wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan melakukan rawat jalan. Praktik Dokter/Bidan, RS Swasta, UKBM, Pengobatan Tradisional masing-masing digunakan kurang dari 10 persen wanita usia 15-49 yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan. Penggunaan Praktik Dokter/Bidan hanya sebesar 8,34 persen, dan penggunaan RS Swasta sekitar 9,42 persen, UKBM sebesar 1,56 persen, Pengobatan Tradisional sebesar 0,16 persen dan fasilitas lainnya sebesar 1,38 persen.

Tabel 10. Jumlah Wanita Subur (Usia 15-49 Tahun) yang Pernah di Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	WUS Dengan Keluhan Kesehatan		
	Jumlah	Rawat Inap	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Seribu	6.173	250	4,05
Jakarta Selatan	642.405	34.402	5,36
Jakarta Timur	820.770	52.166	6,36
Jakarta Pusat	257.556	15.598	6,06
Jakarta Barat	744.012	40.137	5,39
Jakarta Utara	533.360	37.051	6,95
DKI Jakarta	3.004.276	179.604	5,98

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 15. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 11. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

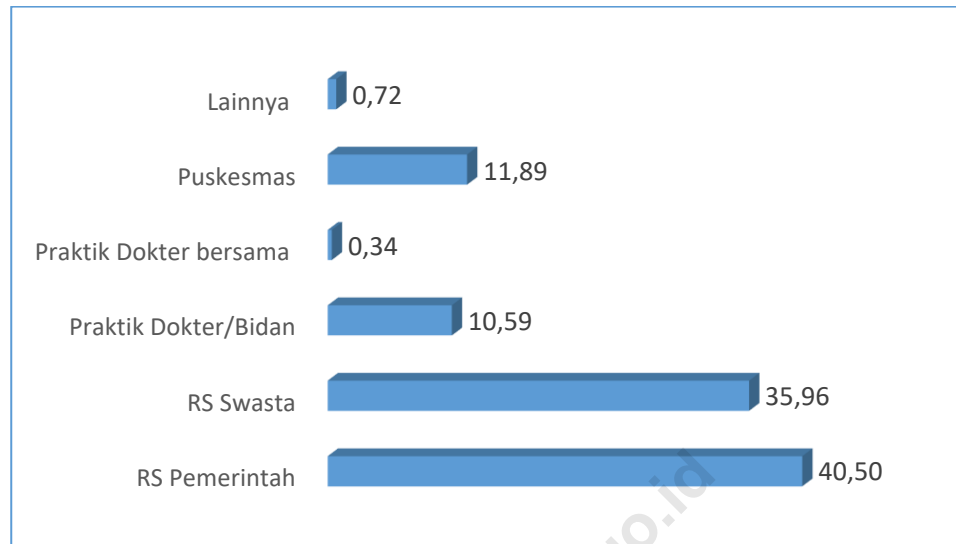
Kab/Kota	RS Pemerintah	RS swasta	Praktik dokter/ bidan	Klinik/ Praktik dokter bersama	Puskesmas	UKBM	Praktik pengobatan tradisional/ alternatif	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kep. Seribu	9,65	-	7,24	3,65	79,46	-	-	-	100
Jakarta Selatan	12,54	5,74	16,9	25,35	36,57	-	-	2,9	100
Jakarta Timur	13,85	12,49	10,57	17,16	43,94	1,99	-	-	100
Jakarta Pusat	7,29	11,38	6,64	14,51	59,07	-	-	1,11	100
Jakarta Barat	8,64	4,12	3,21	32,33	48,48	1,04	0,62	1,56	100
Jakarta Utara	17,83	13,68	6,74	12,94	42,66	3,66	-	2,49	100
DKI Jakarta	12,33	9,42	8,34	21,19	45,62	1,56	0,16	1,38	100

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Apabila diperhatikan pilihan fasilitas rawat jalan yang digunakan oleh wanita usia 15-49 tahun yang mengalami kesehatan dan melakukan rawat jalan tampak di seluruh Kabupaten/Kota DKI Jakarta, mereka lebih memilih Puskesmas sebagai tempat berobat jalan.

Di Kabupaten Kepulauan Seribu fasilitas Puskesmas menjadi fasilitas rawat jalan yang digunakan oleh lebih dari separuh wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan. Selanjutnya, Klinik/Praktik Dokter Bersama menjadi pilihan setelah RS Pemerintah dan Praktik Dokter/Bidan. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan di RS Swasta pada umumnya di atas 10 persen, kecuali Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Di Kabupaten Kepulauan Seribu bahkan untuk berobat jalan tidak ada yang menggunakan RS Swasta, tetapi lebih memilih ke RS Pemerintah.

Gambar 16. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Melakukan Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Apabila wanita usia 15-49 tahun mengalami keluhan kesehatan dan harus rawat inap, mereka dapat memilih jenis fasilitas rawat inap yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun swasta. Gambar 16 menunjukkan bahwa fasilitas rawat inap yang banyak dipilih oleh wanita umur 15-49 tahun adalah Rumah Sakit Pemerintah(40,49%), dan Rumah Sakit Swasta (35,96%). Secara keseluruhan penggunaan Rumah Sakit untuk rawat inap wanita usia 15-49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 76,45 persen. Fasilitas rawat inap di tempat Praktik Dokter/Bidan digunakan oleh sekitar 10,59 persen.

Sementara itu jumlah wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan melakukan rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hanya sekitar 11,89 persen. Saat ini memang terdapat Puskesmas yang sudah melayani rawat inap terutama Puskesmas kecamatan yang tersedia di semua kecamatan di DKI Jakarta.

Tabel 12. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Praktik Dokter Bersama	Puskesmas	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Seribu	35,31	-	-	-	64,69	-	100,00
Jakarta Selatan	24,55	53,73	6,08	-	11,86	3,78	100,00
Jakarta Timur	43,59	37,86	7,19	-	11,36	-	100,00
Jakarta Pusat	51,20	35,64	2,59	-	10,57	-	100,00
Jakarta Barat	50,39	14,18	22,95	-	12,48	-	100,00
Jakarta Utara	35,81	40,69	9,64	1,64	12,22	-	100,00
DKI Jakarta	40,49	35,96	10,60	0,34	11,89	0,72	100,00

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

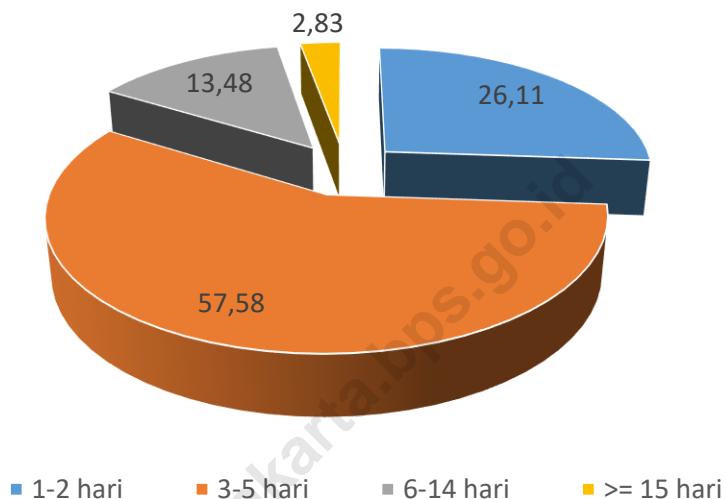
Wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan melakukan rawat inap di seluruh kab/kota DKI Jakarta lebih menyukai fasilitas RS Pemerintah dibandingkan dengan RS Swasta. Hal ini tampak dari persentase penggunaan RS Pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan RS Swasta.

Apabila dibandingkan antar wilayah, persentase penggunaan fasilitas rawat inap berupa tempat Praktik Dokter/Bidan paling banyak digunakan oleh wanita usia 15-49 tahun di Jakarta Barat (22,95%). Penggunaan Puskesmas sebagai tempat rawat inap wanita usia 15-19 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan di hampir semua wilayah relatif rendah, hanya di atas 10% kecuali di Kabupaten Kepulauan Seribu (64,69%).

Hari rawat inap adalah hari dimana seorang wanita usia subur melakukan rawat inap di fasilitas kesehatan yang disebabkan karena keluhan kesehatan yang dialaminya.

Termasuk rawat inap yang disebabkan karena wanita tersebut melahirkan anaknya. Jumlah hari rawat inap tersebut bervariasi mulai dari 1 hari rawat inap atau bahkan ada yang mencapai 15 hari atau lebih.

Gambar 17. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Melakukan Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Jumlah Hari Rawat Inap di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 13. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Jumlah Hari Rawat Inap dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Rawat Inap				Jumlah
	1-2	3-5	6-14	≥ 15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Seribu	16,50	83,50	-	-	100,00
Jakarta Selatan	27,58	60,08	9,33	3,01	100,00
Jakarta Timur	21,07	58,97	15,28	4,68	100,00
Jakarta Pusat	23,16	53,67	15,43	7,73	100,00
Jakarta Barat	28,99	58,02	12,98	-	100,00
Jakarta Utara	30,00	54,35	14,60	1,05	100,00
DKI Jakarta	26,11	57,59	13,48	2,83	100,00

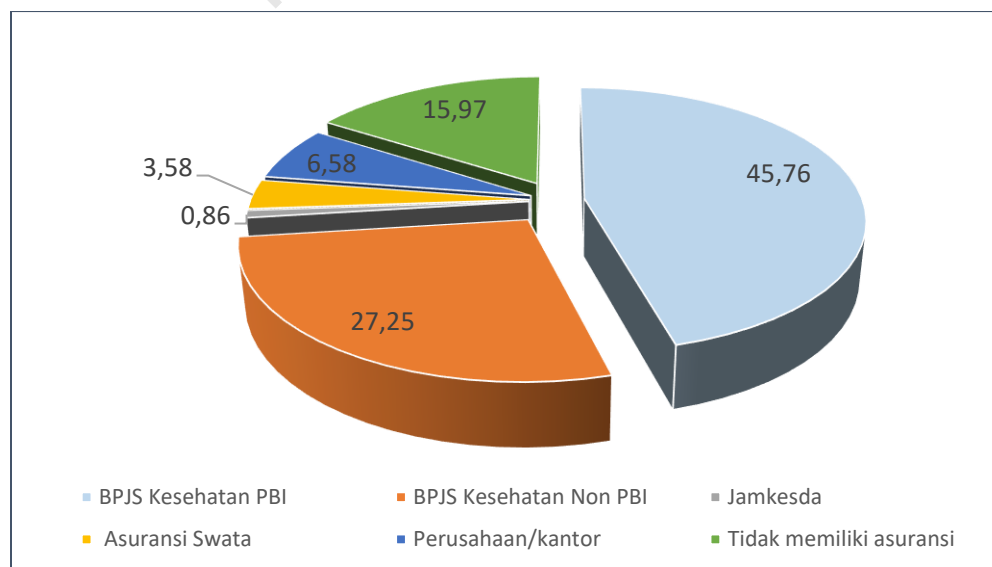
Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 17 menunjukkan bahwa jumlah hari rawat inap wanita usia 15-49 tahun sebagian besar (57,58%) selama 3-5 hari. Jumlah hari rawat inap selama satu sampai dua hari dialami oleh sekitar 26,11 persen wanita usia 15-49 tahun. Untuk yang rawat inap seminggu sampai dua minggu (6-14 hari) dialami sekitar 13,48 persen. Jumlah hari rawat inap selama lima belas hari atau lebih paling banyak dialami oleh wanita usia 15-49 tahun di Kota Pusat mencapai 7,73 persen (Tabel 13).

4.4. Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Pada penduduk wanita usia 15-49 tahun, masih terdapat sekitar 15,97 persen yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Sisanya (84,03 persen) penduduk wanita usia 15-49 tahun sudah mempunyai jaminan kesehatan (Gambar 18). Jenis bantuan yang dimaksud disini meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI), Jamkesda, Perusahaan/Kantor tempat bekerja, dan Asuransi swasta.

Gambar 18. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Kepemilikan Jenis Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Gambar 18 menunjukkan bahwa 45,76 persen wanita usia 15-49 tahun menerima jaminan kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), lebih banyak dibandingkan dengan wanita usia 15-49 tahun yang menerima jaminan kesehatan berupa Non PBI (27,25 %). Jaminan kesehatan dari Perusahaan/Kantor dirasakan oleh 6,58 persen wanita usia 15-49 tahun, 3,58 persen dari asuransi swasta, dan sisanya sekitar 0,86 persen wanita usia 15-49 tahun mendapatkan jaminan kesehatan dari Jamkesda.

Kondisi wanita usia 15-49 tahun menurut kepemilikan jaminan kesehatan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta tahun 2018 ditunjukkan oleh Tabel 14. Tampak bahwa jumlah wanita usia 15-49 tahun yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali paling banyak di Kota Jakarta Selatan (18,81 %). Sedangkan jumlah wanita usia 15-49 tahun yang paling sedikit tidak mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 1,80 persen. Jumlah wanita usia 15-49 tahun tanpa jaminan kesehatan di Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara berkisar 12-17 persen dari total wanita usia 15-49 tahun di masing-masing wilayah.

Wanita usia 15-49 tahun dengan jaminan kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) paling banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, mencapai 58,05 persen. Begitu pula dengan penerima jaminan kesehatan berupa Non PBI paling banyak juga di Kabupaten Kepulauan Seribu (40,79 persen). Penerima bantuan Non PBI di wilayah lain berkisar antara 23-40 persen dari total wanita usia 15-49 tahun di masing-masing wilayah.

Tabel 14. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kabupaten/Kota	Penerima Bantuan Iuran	Non		Asuransi swasta	Perusahaan/kantor	Tidak punya
		Penerima Bantuan Iuran	Jamkesda			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	58,05	40,79	-	0,02	-	1,80
Jakarta Selatan	39,02	28,06	1,00	4,86	8,44	18,81
Jakarta Timur	45,08	30,61	0,84	3,41	8,24	12,61
Jakarta Pusat	44,35	29,67	2,91	2,89	5,26	15,11
Jakarta Barat	52,55	24,19	0,30	2,25	3,44	17,67
Jakarta Utara	46,23	23,96	0,51	4,47	6,75	16,99
DKI Jakarta	45,76	27,25	0,86	3,58	6,58	16,15

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada wanita usia 15-49 tahun yang mempunyai jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor. Jenis jaminan ini paling banyak diterima oleh wanita usia 15-49 tahun di Kota Jakarta Selatan (8,44%) dan Kota Jakarta Timur (8,24). Jaminan dari Asuransi Swasta paling sedikit di Kepulauan Seribu, tidak mencapai 1 persen.

Di masa yang akan datang, seiring dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah digulirkan oleh pemerintah, diharapkan seluruh penduduk Indonesia termasuk wanita usia 15-49 tahun berkesempatan besar untuk memperoleh proteksi kesehatan dengan lebih baik.

Mereka yang mampu dapat menjadi peserta dengan menyisihkan sebagian uangnya. Bagi masyarakat tidak mampu maka kesehatan mereka akan ditanggung oleh pemerintah dengan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan demikian kedepan tidak ada alasan lagi masyarakat tidak mampu tidak memeriksakan keluhan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

4.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Keluarga Berencana atau biasa disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Makna KB adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Gerakan ini mulai dicanangkan pada akhir tahun 1970-an dengan menganggap jumlah anak dalam sebuah keluarga yang ideal adalah 2 anak (Wikipedia). Tujuan umum KB adalah meningkatkan kesejahteraan tidak hanya ibu tetapi juga kesejahteraan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Selain alat kontrasepsi juga terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dengan tujuan sama, mencegah kehamilan. Jenis kontrasepsi sementara (*temporer*) juga disebut dengan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (MKJP), atau kontrasepsi tidak tetap karena kemampuan hamil wanita dapat dikembalikan.

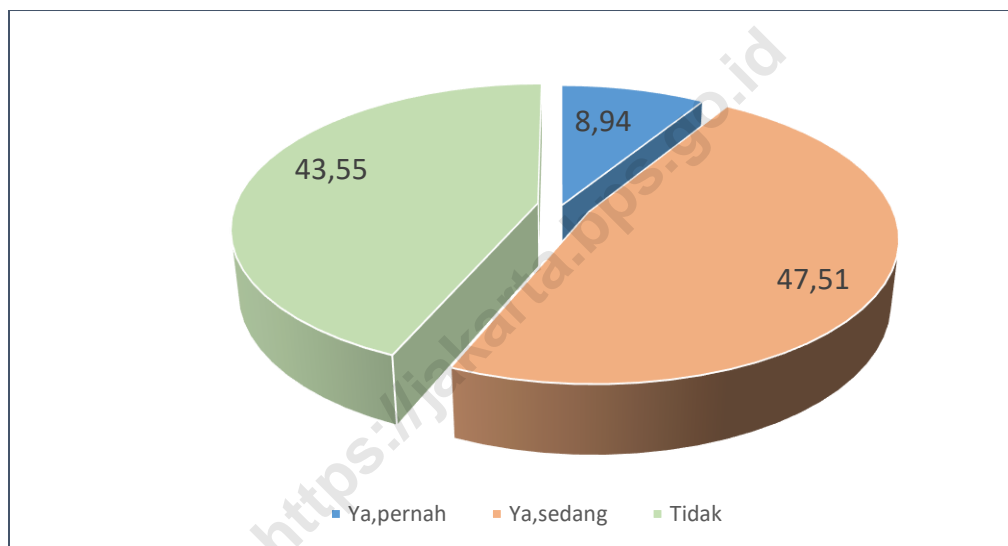
Kontrasepsi ini dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat bantu. Kontrasepsi *temporer* dengan alat bantu misalnya Pil KB, Susuk KB, KB Suntik, Spiral KB, Spermisida (Jeli, Diafragma/*Cervical Cup*, Kondom, dan Koyo Ortho Evra, juga termasuk *after morning pil*. Sedangkan kontrasepsi temporer tanpa alat bantu dapat dilakukan dengan cara seperti memperpanjang masa menyusui, metode kalender (tidak melakukan hubungan intim pada waktu masa subur wanita), senggama terputus (*coitus interruptus*) dengan mengeluarkan sperma di luar tubuh agar tidak masuk ke dalam uterus wanita), juga termasuk tidak melakukan hubungan suami istri ketika suhu tubuh wanita tinggi (suhu tubuh diukur dengan thermometer, suhu tubuh wanita setelah masa ovulasi meningkat $0,2 - 0,4^{\circ}\text{C}$).

Jenis kontrasepsi permanen (selamanya) dikenal juga dengan istilah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Metode ini hanya tepat dilakukan jika wanita dan pasangan memilih tidak atau sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi. Metode sterilisasi ini dilakukan dengan cara :

1. Tubektomi (*tubal ligation*) adalah prosedur bedah suka rela untuk menghentikan fertilitas seorang wanita secara permanen.
2. Implan tuba, dengan menggunakan implan berupa 2 logam kecil fleksibel berbentuk tabung yang panjangnya kira-kira 4 cm dan tidak memerlukan prosedur bedah dalam penerapannya.
3. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan operasi kecil sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.

Berdasarkan data Susenas Maret 2018 yang ditampilkan dalam Gambar 19 tampak bahwa pada wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin sebanyak 43,55 persen tidak pernah menggunakan alat KB, sisanya lebih dari separuh (56,45%) pernah berpartisipasi dalam program KB dengan perincian 8,94 persen sudah tidak menggunakan lagi dan 47,51 persen masih menggunakan alat KB.

Gambar 19. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di DKI Jakarta, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 15. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB dan Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Kepulauan Seribu	7,10	57,34	35,55	100,00
Jakarta Selatan	6,90	47,78	45,32	100,00
Jakarta Timur	11,06	43,82	45,12	100,00
Jakarta Pusat	13,17	45,29	41,53	100,00
Jakarta Barat	8,39	52,71	38,90	100,00
Jakarta Utara	6,73	46,83	46,44	100,00
DKI Jakarta	8,94	47,51	43,55	100,00

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 15 memperlihatkan bahwa persentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak pernah ber-KB paling banyak terdapat di Kota Jakarta Utara, mencapai 46,44 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Kota Jakarta Selatan (45,32 %) dan Kota Jakarta Timur (5,12 %). Angka paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, sebesar 35,55 persen.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

5.1 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jenis sarana kesehatan yang akan dibahas secara detail dalam publikasi ini yakni Puskesmas dan rumah sakit :

1) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Dalam pelayanan kesehatan secara medis berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya, puskesmas dibagi menjadi dua kelompok yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap.

Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberikan tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan, sedangkan puskesmas non rawat inap adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap.

2) Rumah Sakit

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dari pengertian diatas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau perseorangan.

Tabel 15 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan terbanyak di Provinsi DKI Jakarta adalah Posyandu sebanyak 4.250 unit, kemudian Klinik/Balai Kesehatan sebanyak 1.061 unit. Pada tahun 2019 jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mencapai 340 unit. Posyandu tersebar di hampir setiap wilayah RW di DKI Jakarta, dan Puskesmas hampir di setiap wilayah kelurahan mempunyai Puskesmas yaitu Puskesmas kelurahan selain terdapat Puskesmas kecamatan di seluruh kecamatan di DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta terdapat 135 Rumah Sakit Umum, 51 Rumah Sakit Khusus, dan 19 Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin.

Tabel 16. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, 2019

Kab/Kota	RS Umum	RS Khusus	RS Bersalin/RB	Puskesmas	Klinik/Balkes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	1	0	0	8	0	33
Jakarta Selatan	38	15	7	79	212	1.235
Jakarta Timur	32	14	5	87	72	1.124
Jakarta Pusat	24	10	2	44	205	479
Jakarta Barat	18	7	2	73	264	765
Jakarta Utara	22	5	3	49	308	614
DKI Jakarta	135	51	19	340	1.061	4.250

Sumber : Jakarta Dalam Angka, 2019

5.2 Petugas Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan

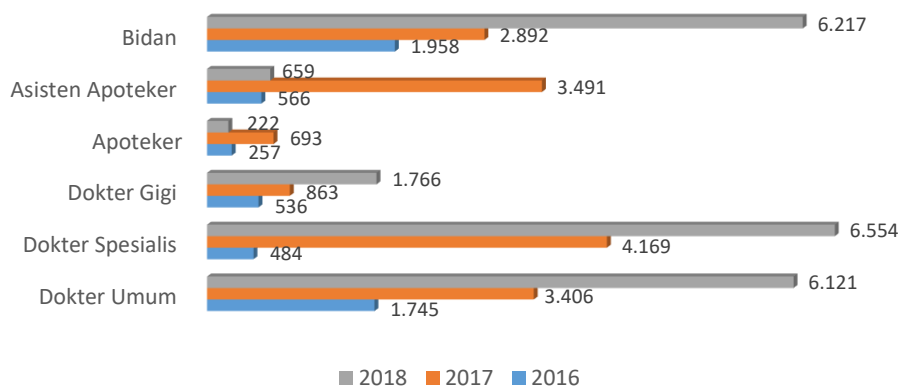
untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan manusia.

1) Jumlah Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang berkualitas tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan di sektor kesehatan. Gambar 20 memperlihatkan jumlah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker dan bidan yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum jumlah tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 di semua jenis tenaga.

Tenaga kesehatan berupa Dokter spesialis mempunyai jumlah paling banyak pada tahun 2018 mencapai 6.554 orang. Demikian juga dengan jumlah Dokter Umum dan Bidan masing-masing sebanyak 6.121 orang dan 6.217 orang. Jumlah Dokter Gigi relatif lebih sedikit, hanya sebanyak 1.766 orang pada tahun 2018.

Gambar 20. Jumlah Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta, 2016-2018



Sumber : BPS, Jakarta Dalam Angka, 2019

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan Salemba Tengah No. 36-38, Senen, Jakarta Pusat
Telp. 021 31928493; email : bps3100@bps.go.id;
website : www.jakarta.bps.go.id

ISBN 978-602-0922-23-2



9 786020 922232